

GERBANG ETAM

Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- ➊ **PENGARUH NARKOBA TERHADAP KEHIDUPAN PARA PELAJAR SLTP DAN SLTA DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- ➋ **MODEL PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**
- ➌ **STUDI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN PENDINGIN KELURAHAN PENDINGIN KECAMATAN SANGA-SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- ➍ **PRAKONDISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKINDI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- ➎ **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

GERBANG ETAM

PENGARAH : KEPALA BALITBANGDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

PENANGGUNG JAWAB : DRS. H. AGUS EKA SUBANDI, M. Si

PENYUNTING : Dr. Ir. INCE RADEN, MP (FAK. PERTANIAN UNIKARTA)

Dr. Ir. THAMRIN, MP (FAK. PERTANIAN UNIKARTA)

Ir. DWI UTOMO M. Si (BALITBANGDA KAB. KUKAR)

MOH. DAHLAN, SE, M. Si (BALITBANGDA KAB. KUKAR)

DEDY WAHYUDIANSYAH, SE (BALITBANGDA KAB. KUKAR)

PPTK : RINA ASMIARNA, S. Pi

PIMPINAN REDAKSI : H. M. SOLEH PULUNGAN, S. Pd, MH

EDITOR & LAYOUT : FATHIMATUZZUHROH, ST

FIRDAN

STAF REDAKSI : RITA ARIANI, SE

NOOR RAMSYAH

DAFTAR ISI

Hal 1 – 13

PENGARUH NARKOBA TERHADAP KEHIDUPAN PARA PELAJAR SLTP DAN SLTA DIWILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hal 14 - 20

MODEL PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN

Hal 21 - 29

STUDI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN PENDINGIN KELURAHAN
PENDINGIN KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hal 30 - 37

ANALISIS KEBERLANJUTAN
BIOREMEDIASI LIMBAH HIDROKARBON

Hal 38 - 45

SELEKSI BAKTERI USUS IKAN MAS (*Cyprinus carpio* L.) YANG MAMPU MENGHAMBAT
BAKTERI *Aeromonas hydrophila*

Hal 46 - 53

TEHNIK INOKULASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA
PADA RUMPUT SIGNAL

Hal 54 - 60

PRAKONDISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hal 61 - 68

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PRAKONDISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Irwan Gani

1. Pendahuluan

Kemiskinan di dunia mulai dibicarakan sejak berakhirnya perang dunia II. Saat itu bukan hanya negara-negara di dunia ketiga yang dilanda kemiskinan, tetapi juga negara adidaya seperti Amerika Serikat. Meskipun memenangi perang, Amerika Serikat dan sekutunya telah kehabisan sumberdaya akibat membiayai perang yang relatif lama tersebut. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi di mana-mana. Fenomena ini mengantarkan banyak negara untuk membicarakan masalah kemiskinan ("*Modern Theory*" Myrdall tentang "*developing countries*", dalam Poli 2005).

Menarik untuk disimak adalah ketika Nobel Perdamaian 2006 akhirnya jatuh kepada "pejuang kaum miskin". Muhammad Yunus, tokoh perbankan dari Banglades, pendiri dan pengelola *Grameen Bank* akhirnya dianggap lebih layak dari peserta lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan Nobel perdamaian 2006 disematkan pada tokoh kemiskinan dan bukan tokoh perdamaian. Tak lain karena salah satu akar kekerasan yang menimbulkan sulitnya terjadi perdamaian adalah kemiskinan. Membebaskan orang dari kemiskinan adalah membebaskan orang dari kekerasan. Membebaskan orang dari kekerasan adalah modal menciptakan perdamaian. Singkatnya, seluruh kebebasan, termasuk kebebasan dari kemiskinan

pada masa sekarang (terutama di negara-negara miskin) jauh lebih penting dari sekedar bebas dari kekerasan dan perang. Ternyata, mengatasi kemiskinan jauh lebih penting daripada menghadirkan perdamaian.

2. Mengapa Pemberdayaan?

Program pemberdayaan masyarakat adalah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Mengapa pemberdayaan? Poli (2005) menyebutkan; Pertama, karena adanya fakta bahwa kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif telah menglobal. Kedua karena adanya suara hati (*heart*) dari sejumlah orang yang tergerak untuk menanggapi fakta kemiskinan mutlak dan relatif dengan fikiran (*head*), dan tindakan nyata (*hand*). Terkait dengan fakta bahwa kemiskinan telah menjadi masalah global, nasional dan lokal, maka uraian berikut ini akan menjelaskan lebih lanjut:

a) Kemiskinan Global

Maddison (2001, dalam Mochtar, 2008) menghasilkan dua kurva, tentang "Kemakmuran" manusia serta pertumbuhan penduduk dunia sepanjang 2000 tahun. Kurva pertama memperlihatkan bahwa hampir sepanjang 20 abad, rata-rata manusia sedunia miskin, termasuk orang Eropa. Menjelang abad ke-19, barulah kurva GDP per kapita dunia rata-rata mulai menggeliat ke atas

setelah terus mendarat dalam arti miskin, yakni kurang dari 1.000 dollar AS hingga sekitar 6.000 dollar AS tahun 2000. Namun, dari 6.000 dollar AS rata-rata dunia ini, kontribusi terbesar adalah dari Eropa. Rata-rata Eropa sekitar 20.000 dollar AS.

Kurva kedua dari kurva Maddison adalah kurva pertumbuhan penduduk dunia yang bentuknya hampir identik dengan kurva pertama. Dengan menggunakan kurva yang sama, ternyata sepanjang 1.800 tahun jumlah penduduk dunia kurang dari 1.000 juta. Baru pada abad ke-19, kurva ini mulai melejit naik mencapai lebih dari 6.000 juta jiwa tahun 2000. Sesudah revolusi sains, industri, dan teknologi (iptek), ternyata jumlah penduduk dunia tumbuh secara fantastis. Namun, dari 6.000 juta penduduk dunia, 85 persen adalah kontribusi dari penduduk miskin yang masyarakatnya hanya menjadi *technological adaptors* (50 persen) dan *technologically excluded* (35 persen). Pertumbuhan penduduk masyarakat cerdas terkendali, sedangkan pertumbuhan penduduk yang tersisih karena penguasaan teknologi yang rendah sulit dikendalikan. Dari peta teknologi dunia terbukti di wilayah ini pula masyarakat miskin hidup berdesakan dalam kondisi kesehatan yang rendah (Sachs, 2002, dalam Mochtar)

b) Kemiskinan Nasional

BPS RI (2008) melaporkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 1996-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis

ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

c) Kemiskinan Lokal

Tingginya angka kemiskinan di

Kalimantan Timur terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipertanyakan karena daerah tersebut merupakan daerah terkaya di Indonesia dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Tahun 2007 terdapat 56.423 rumah tangga miskin (RTM), yang sebagian besar berada di wilayah pesisir. Besaran jumlah RTM di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Besarnya jumlah RTM di Kutai Kartanegara mengindikasikan bahwa program pembangunan di salah provinsi terkaya di Indonesia ini, belum optimal tingkat keberhasilannya. Di sisi lain, keadaan ini mengisyaratkan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum berjalan sesuai harapan.

3. Pemberdayaan dengan Pendekatan Target Group

Pentingnya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan secara implisit telah disepakati sejak tahun 1972, saat PBB menyelenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Pemicunya, tekanan negara maju yang khawatir pada masalah lingkungan hidup, khususnya pencemaran. Namun, dalam persiapannya tumbuh pengertian bahwa di negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) masalah lingkungan hidup justru timbul karena kurangnya pembangunan. Lahirlah konsep *eco-development* yang di Indonesia dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan diperlukan dan harus dilaksanakan. Tetapi

pembangunan itu tak boleh merusak lingkungan hidup.

Tahun 1987 terbit laporan Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Komisi Brundtland) yang memiliki tema "Hari Depan Kita Bersama" (*Our Common Future*). Komisi Brundtland merupakan persiapan untuk Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 1992 yang dikenal dengan KTT Bumi. Tema pembangunan berkelanjutan mendominasi KTT Bumi. Hasil utamanya berupa "AGENDA 21" : Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam Agenda 21, dimuat resep untuk negara-negara berkembang yang terdiri dari; 1) penanggulangan kemiskinan, 2) pelestarian lingkungan, dan 3) pemberdayaan masyarakat lokal. (Poli, 2005).

Sepuluh tahun kemudian, komitmen semua negara di dunia untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam "Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan" yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002.

Hasil deklarasi Johannesburg kemudian dituangkan dalam dokumen "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan", yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015. Dalam deklarasinya negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (*goal*) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia

termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000).

Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti hasil deklarasi tersebut, telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015.

Meskipun Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam *Human Development Report 2007* yang dikeluarkan oleh UNDP, kualitas manusia Indonesia makin memburuk 10 tahun terakhir. HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat IPM Indonesia setiap tahunnya cenderung menurun dari 177 negara yang dinilai UNDP. Tahun 1996 Peringkat Indonesia adalah 102, dan terus menurun sampai Tahun 2007 yang hanya menempati urutan ke 111 (UNDP, 2009).

Banyak pendekatan yang telah digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, berbagai pendekatan tersebut lebih banyak terfokus pada pihak intervensi (pelaku

pemberdayaan). Seperti yang disebutkan oleh Poli (2005); "awal kegagalan pembangunan: orang "sok pintar" yang membuat keputusan untuk dikerjakan "orang bodoh". Kekurangan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan lama melahirkan pendekatan terhadap "*target group*" (kelompok miskin/sasaran), sebagai subyek pembangunan untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri. Overweel (2008) menyebutkan bahwa pendekatan *target group* dimulai di tahun 1970-an di masa-masa awal pembangunan. Kata ini diartikan sebagai perhatian yang patut diberikan kepada masyarakat paling miskin, sebagai kebalikan dari bantuan pembangunan infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman seperti pembangunan jembatan dan Rumah Sakit yang tampaknya lebih bermanfaat bagi mereka yang bisa mengaksesnya.

Istilah *target group* juga digunakan dalam dunia pemasaran dan periklanan. Jika sebuah perusahaan memiliki suatu produk untuk dijual, perusahaan tersebut harus menentukan siapa *target group* dan meyakinkan orang-orang tersebut bahwa produk yang dijual akan membuat kehidupan mereka lebih baik. Sejalan dengan pemikiran ini, pelaku pembangunan atau pemberdayaan juga "*menjual*" program pembangunan mereka dan mereka juga harus meyakinkan *target group* bahwa program tersebut bagus untuk mereka. Kata Overweel (2008) lagi: "Mungkin analogi yang dijelaskan disini terdengar agak sarkastik, tapi begitulah kenyataannya".

Pemberdayaan masyarakat menempatkan aktor atau pelaku pembangunan adalah masyarakat. Hal ini mengingat salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang memiliki daya, kekuatan atau kemampuan berpartisipasi aktif dalam

pembangunan serta memiliki kebebasan di segala bidang kehidupan. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan upaya dan kerja keras dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, pelaku pemberdayaan, dan utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sasaran dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal secara optimal agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri (mandiri). Beberapa ahli lebih menekankan pentingnya memperhatikan *local-wisdom* dalam pemberdayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pemberdayaan pada prinsipnya adalah upaya untuk memberikan kemampuan/daya (*power*) kepada masyarakat sasaran pemberdayaan. Poli (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan rakyat-masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan, di dalam konteks sosial budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat. Pendapat Poli ini makin mempertegas bahwa peningkatan kemampuan adalah tujuan dari pemberdayaan, yang secara lebih detail disebutkan oleh Poli (2005): "Peningkatan kemampuan masyarakat lokal berarti peningkatan kemampuannya untuk terlepas dari empat dimensi kemiskinan: (1) *lack of choice* (kemiskinan ekonomi); (2) *lack of voice* (kemiskinan politik); (3) *lack of status* (kemiskinan sosial); (4) *lack of self-confidence* (kemiskinan percaya diri; psikologis)".

Demikian pula dengan pemberdayaan Masyarakat miskin Kabupaten Kutai Kartanegara,

seharusnya dapat memiliki satu kesatuan pandangan tentang makna dan tujuan pemberdayaan. Tiga pelaku pemberdayaan (pemerintah, perusahaan, dan LSM) bisa saja memiliki pandangan yang sama atau berbeda tentang pemberdayaan. Kesamaan atau ketidaksamaan pandangan adalah masalah pertama yang harus diurai. Sebab, latar belakang ke tiga pelaku pemberdayaan pasti berbeda.

Permasalahan berikutnya akan muncul ketika program pemberdayaan yang dilakukan oleh tiga pelaku dilaksanakan kepada kelompok masyarakat sasaran (*Target Group*). Permasalahan akan muncul dari berbagai kombinasi kemungkinan makna dan tujuan pemberdayaan, meskipun ke tiga pelaku memiliki makna dan tujuan yang sama, apalagi jika berbeda. Sebagai contoh, pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program Gerbang Dayaku, sangat ideal dan bagus. Namun implementasi program dan pencapaian tujuan pemberdayaan belum tentu dapat terealisasi dengan baik. Degradasi makna pemberdayaan dapat terjadi mengingat pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh *person* yang belum tentu dapat menangkap makna filosofis dari program pemberdayaan Gerbang Dayaku.

Program pemberdayaan masyarakat juga tidak boleh mengabaikan *target group*. Pendapat, partisipasi, dan tanggapan *target group* menjadi poin penting, mengingat *target group* adalah pihak yang akan diberdayakan. Penolakan, sikap antipati, dan ketidakpedulian masyarakat, adalah indikasi pengabaian akan pendapat dan tanggapan *target group* terhadap setiap program yang dilaksanakan pelaku pemberdayaan. Pengungkapan pendapat

dan tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan, di sisi lain juga dapat memetakan *target group* ke dalam berbagai kelompok posisi. Tidak mesti *target group* berada pada posisi "nol", tentang pemberdayaan. Tidak jarang pengalaman justru menempa *target group* menjadi kelompok yang tahu tentang pemberdayaan, dibandingkan pelaku pemberdayaan sendiri. Jika posisi *target group* telah dapat dipetakan, maka pola pendekatan, program, dan cara pemberdayaan akan menjadi lebih efektif.

Permasalahan pemberdayaan dapat terungkap dengan jelas, jika dapat memunculkan

4. Kesimpulan

Sebelum melaksanakan pemberdayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka harus diungkapkan terlebih dahulu prakondisi pemberdayaan, yaitu; **Pertama**, makna pemberdayaan bagi pemerintah, perusahaan, dan LSM. Makna pemberdayaan dari tiga *change agent* tersebut bisa saja sama, berbeda, atau pada sisi tertentu sama, sementara pada sisi lainnya berbeda. **Kedua**, pengungkapan program dan pendekatan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh tiga *change agent*. Fokusnya adalah pengungkapan distorsi antara makna pemberdayaan di antara tiga *change agent* (pemerintah, perusahaan, dan LSM). **Ketiga**, pengungkapan makna pemberdayaan dari sudut pandang masyarakat. Fokusnya adalah mengungkap apa yang pernah terjadi dari luar (pemberdayaan dari luar), apa yang telah dibuat masyarakat sendiri (pemberdayaan dari dalam), dan dari kedua bentuk pemberdayaan tersebut,

makna dibalik semua tindakan yang dilakukan pelaku pemberdayaan (*change agent* atau agen perubahan) dan *target group*. Pengungkapan makna tindakan antara *change agent* dan *target group* ini akan menjadi *starting point* untuk mengkaji berbagai program dan pendekatan yang paling tepat bagi masyarakat. Pada gilirannya, tujuan pemberdayaan akan lebih mudah tercapai, karena terdapat kesamaan pandangan dan pendapat antara *change agent* dan *target group* dalam memaknai arti pemberdayaan.

apa hasilnya. **Keempat**, mengungkapkan keikutsertaan dan tanggapan masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh tiga *change agent* (pemerintah, perusahaan, dan LSM). Keikutsertaan dan tanggapan masyarakat difokuskan untuk menangkap posisi masyarakat dalam pemberdayaan. Tiga kemungkinan posisi masyarakat miskin diungkapkan Overweel (2008), yaitu: Kelompok pertama, *Target Group* (masyarakat miskin/masyarakat sasaran) mengetahui apa yang harus dilakukan. Kelompok kedua, kelompok "*culture of poverty*", yang menganggap bahwa mereka memang ingin miskin. Kelompok ketiga, adalah kelompok masyarakat yang tidak menyadari mereka miskin. Penentuan posisi masyarakat dapat menjadi "*entry point*" untuk pemberian saran (*what to do*), yang dapat berupa saran tentang program dan pendekatan pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar, Ari. 2009. *"Revolusi Pengetahuan, Kemiskinan dan Politik*. Website Ahmad Wiryawan.
<http://www.ahmadheryawan.com/>
- Overweel, Jeroen A. 2008. *The Marind in A Changing Environment*. YAPSEL. Irian Jaya. Indonesia.
- Poli, W.I.M, 2005. *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu*. (Tidak dipublikasikan). Pascasarjana (S3) Universitas Hasanuddin. Makassar.
- , 2006. *Suara Hati yang Memberdayakan*, Pustaka Refleksi. Makassar
- , 2007. *Modal Sosial Pembangunan*, Hasanuddin University Press. Makassar.
- UNDP. 2006. *Human Development Report 2006. United Nations Development Programme*.